

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BPR KURNIA SEWON YOGYAKARTA

A. Identitas Perusahaan

Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 tentang perbankan, pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :

“Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Berdasarkan pengertian di atas, PT. BPR Kurnia Sewon yang merupakan BPR konvensional dalam melaksanakan kegiatan hanya meliputi penghimpunan dana dan dibatasi hanya dalam wilayah-wilayah tertentu saja. BPR juga dilarang ikut kliring serta transaksi valuta asing. Sebagai bank konvensional PT. BPR Kurnia memiliki maksud dan tujuan, yaitu : (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan; (b) memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan.

Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Adapun Misi dari PT. BPR Kurnia Sewon adalah bersama-sama dengan masyarakat sekitar untuk mencapai suatu perkembangan di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam mencapai misi tersebut PT. BPR Kurnia Sewon membantu masyarakat di wilayah sekitarnya yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang melalui sektor keuangan. Sesuai dengan peran BPR, secara garis besar yaitu sebagai lembaga *microfinance* yang membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam akses ke bank umum dan juga menjalankan fungsi lembaga keuangan yaitu sebagai lembaga intermediasi, maka PT. BPR Kurnia Sewon mencoba membantu dan menarik minat kesadaran masyarakat akan pentingnya peran BPR dalam meningkatkan taraf hidup sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PT. BPR Kurnia Sewon memiliki cakupan wilayah kerja di daerah Bantul dan sekitarnya. Lokasi kantor pusat PT. BPR Kurnia Sewon berada di wilayah bagian utara kabupaten Bantul dan berbatasan dengan wilayah Kodya Yogyakarta bagian selatan. Dikarenakan kantor pusat PT. BPR Kurnia Sewon berada dibagian utara maka untuk memperluas jaringan pemasaran dan pelayanan PT. BPR Kurnia Sewon memiliki kantor kas di Bantul bagian selatan, tepatnya di Jalan Imogiri Timur Km 15, Dukuh Imogiri, Yogyakarta.

B.Sejarah Perkembangan Perusahaan

PT. BPR Kurnia Sewon berdiri pada tanggal 20 Maret 1995 yang didirikan oleh : - Drs. Albert Maruli Hutapea

- Hapsoro Soeryowidianto
- Maraup Tobing
- Ratna Sihandari Hapsoro
- Rosy Anna Hutapea

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor : C2-8320 HT.01.01.TH.95 pada tanggal 7 Juli 1995 dan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep.048/KM.07/1996. Setelah mendapatkan izin operasional maka PT. BPR Kurnia Sewon mulai beroperasi untuk melayani masyarakat pada tanggal 1 April 1996 dengan menyewa gedung di Jalan Imogiri Barat 125, Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul.

Pada tanggal 1 November 1999 pindah alamat di Jl. Imogiri Barat KM 5,5 Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Bantul. Pada tanggal 4 November 2002 pindah alamat di Jl. Imogiri Barat Km 4 No 16, Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul. Saat ini PT. BPR Kurnia Sewon memiliki satu kantor pelayanan kas di Imogiri dengan alamat Jl. Imogiri Timur Km 15, Dukuh, Imogiri, Bantul Yogyakarta.

PT.BPR Kurnia Sewon memulai usaha dengan modal sebesar Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 500 helai saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Terjadi beberapa kali perubahan kepemilikan sejak pertama kali perusahaan ini didirikan. Pada tanggal 19 November 1999 terjadi perubahan kepemilikan sebagaimana dalam akta notaris nomor 9 oleh Notaris Christ Arya Minarka, SH. Kemudian pada bulan Juni 2007 sesuai dengan akta no 132 tanggal 23 Juli 2007 terjadi pergantian kepemilikan yang mana kepemilikannya masih berlangsung sampai saat ini.

Sampai dengan 31 Maret 2008, aset PT BPR Kurnia Sewon sebesar Rp. 15.748.822.288,- (Lima belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

C. Struktur Organisasi

Sebagai institusi yang bergerak di bidang perbankan tentunya PT. BPR Kurnia Sewon memiliki struktur organisasi. Dengan Struktur Organisasi yang ada memudahkan untuk memisah fungsi antar setiap bagian pekerjaan, sekalipun rangkap jabatan masih ada setidaknya akan diketahui pada posisi mana karyawan sedang bekerja. Berikut ini adalah struktur organisasi di PT. BPR Kurnia sewon Yogyakarta tahun 2010.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. BPR Kurnia Sewon

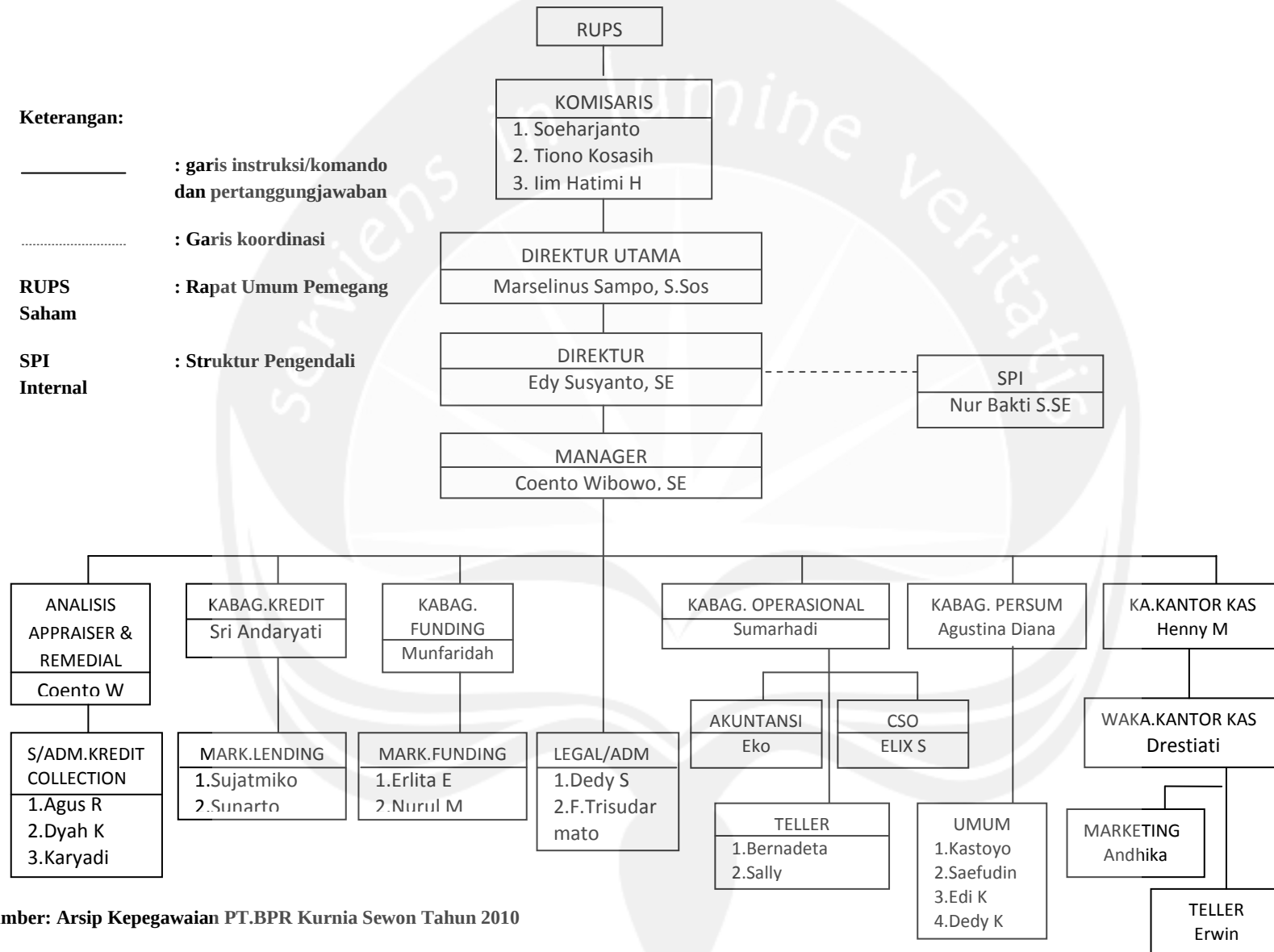
Keterangan:

———— : garis instruksi/komando dan pertanggungjawaban

----- : Garis koordinasi

RUPS Saham : Rapat Umum Pemegang Saham

SPI Internal : Struktur Pengendali



Sumber: Arsip Kepegawaian PT.BPR Kurnia Sewon Tahun 2010

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, PT. BPR Kurnia Sewon memiliki RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di bagian teratas. RUPS adalah organ terpenting dalam suatu Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direktori atau komisaris.

Setelah ada RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dibawahnya terdapat Komisaris. Tugas Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan nasihat itu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum – baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direktur merupakan susunan organisasi berikutnya. Direktur Perseroan Terbatas bisa terdiri dari satu orang atau bisa juga lebih dari satu orang, hal itu tergantung dari kebutuhan operasional Perseroan. Di PT. BPR Kurnia Sewon terdapat 2 Direktur yaitu Marselinus Sampo, S.Sos sebagai Direktur Utama dan Edy Susyanto, SE sebagai direktur. Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan.

Dalam struktur organisai PT. BPR Kurnia Sewon terdapat SPI (Satuan Pengendali Internal). SPI berdiri sendiri karena tidak berhubungan dengan divisi lain.

Adapun status dari SPI ialah berkoordinasi dengan Direktur. Tugas utama dari SPI adalah membantu Direktur dalam pengawasan operasional perusahaan serta memberikan solusi kepada Direktur mengenai masalah nasabah.

Dari struktur organisasi, manager berada di posisi berikutnya. Di PT. BPR Kurnia Sewon, Manager membawahi semua divisi sehingga harus melakukan koordinasi dengan semua Kepala bagian. Tugas utama dari manager adalah mengawasi kinerja setiap Kepala bagian.

Sebagai lembaga perbankan, PT. BPR Kurnia Sewon memiliki 7 divisi kerja, yaitu Bagian Analisis Appraiser dan Remedial, Bagian Kredit, Bagian Funding, Bagian Legal Administrasi, Bagian Operasional, Bagian Personalia dan Umum, dan Kantor Kas. Masing-masing divisi dipimpin oleh Kepala Bagian. Tujuh divisi kerja ini masih terbagi lagi dalam sub-sub bagian.

Secara keseluruhan PT. BPR memiliki 28 karyawan yang bekerja sesuai dengan divisinya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah jumlah karyawan berdasarkan divisi kerja yang ada di PT. BPR Kurnia Sewon.

Tabel 2.1 Jumlah Karyawan Berdasarkan Divisi Kerja

Divisi Kerja	Jumlah
Direktur	2
Manager	1
SPI	1
AnalisisAppraiser & Remedial	4
Kredit	2
Funding	2
Legal Administrasi	1
Operasional	6
Persum	7
Kantor Kas	2
Total	28

Sumber : Arsip Kepegawaian PT. BPR Kurnia Sewon 2010

D. Kondisi Persaingan Antar Lembaga Keuangan

Persaingan antar lembaga keuangan dalam melayani masyarakat merupakan tantangan bagi PT. BPR Kurnia Sewon. Memberikan produk fasilitas kredit dan juga produk penghimpunan dana yang menarik merupakan langkah untuk tetap eksis. Lembaga keuangan lain yang menjadi competitor utama di wilayah kantor pusat adalah PT. BPR Artha Parama, dan PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera dimana lokasinya sangat berdekatan, tetapi sampai saat ini menjadi mitra dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Lembaga keuangan yang menjadi competitor utama di kantor kas Imogiri adalah BUKP Imogiri, BPD DIY, BMT Mentari dimana lokasi lembaga keuangan tersebut saling berdekatan. Persaingan terutama untuk mencari

nasabah baru yang biasanya cakupan wilayahnya justru tidak berada di sekitar lokasi kantor pusat.

E. Jenis Produk PT. BPR Kurnia Sewon

Untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat dan menunjang usaha BPR, maka produk yang ditawarkan kepada masyarakat pun disesuaikan dengan karakteristik masyarakat menengah kebawah dan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun produk – produk yang ada di PT. BPR Kurnia Sewon adalah sebagai berikut :

E.1. Tabungan

E.1.1 Tabungan Tamasya

Adalah tabungan untuk pihak ketiga yang merupakan kerja sama dari 45 BPR yang ada di DIY. Tabungan tamasya merupakan tabungan berhadiah yang pengundiannya dilakukan setiap bulan Februari dan Agustus dengan suku bunga sebesar 6 % per tahun.

E.1.2 Tabungan Tania

Adalah tabungan khusus untuk nasabah debitur yang digunakan untuk tabungan beku dan titipan untuk angsuran dengan suku bunga sebesar 4 % per tahun.

E.2. Deposito

Deposito adalah uang yang disimpan di bank yang hanya bisa diambil setelah jangka waktu tertentu. Jasa yang diterima atas deposito adalah bunga deposito, yang

dihitung dengan rate tertentu dikali dengan Jumlah depositonya. rate-nya lebih tinggi sedikit dibanding bunga tabungan dan tidak pernah lebih tinggi dari bunga kredit.

Di PT. BPR Kurnia Sewon, jangka waktu yang ditawarkan untuk deposito ini adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan suku bunga rata-rata 13 % per tahun.

E.3. Kredit

E.3.1 Kredit Karyawan

Adalah kredit yang dikhususkan bagi karyawan baik yang swasta maupun pegawai negeri sipil yang penggunaan kreditnya untuk keperluan konsumtif. Syarat untuk kolektif agunan yang dipersyaratkan hanya SK asli namun untuk perorangan sesuai dengan persyaratan kredit minimum. Dalam membayar angsuran kredit, maksimal hanya mengangsur 40 % dari jumlah gaji. Jangka kredit yang diberikan untuk yang kolektif maksimal 2 tahun dan untuk perorangan maksimal 3 tahun.

E.3.2 Kredit Umum

Adalah kredit khusus untuk pengusaha baik pengusaha mikro maupun pengusaha kecil menengah. Biasanya kredit umum digunakan untuk menambah modal kerja dan investasi. Jangka kredit yang diberikan sama seperti jenis kredit karyawan perorangan yaitu maksimal 3 tahun. Agunan yang menjadi syarat kredit adalah sertifikat hak milik dan BPKB kendaraan bermotor. Plafon kredit yang dapat diajukan maksimal sebesar BMPK.